

Biden dan Xi Jinping Terkonfirmasi Bakal Hadir KTT G20 di Bali

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, 17 kepala negara/pemerintahan anggota G20 telah mengonfirmasi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022 pekan depan.

"Sampai hari ini 17 kepala negara, kepala pemerintahan yang hadir," kata Jokowi di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Denpasar, Selasa (8/11), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menyebutkan, dua dari 17 kepala negara/pemerintahan yang dipastikan hadir adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy belum dipastikan hadir dalam KTT G20.

"Beberapa hari yang lalu saya juga sudah bertelepon. Berbicara lewat telepon dengan Presiden Putin dan Presiden Zelenskyy, Beliau me-

nyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, 17 kepala negara/pemerintahan yang sudah mengonfirmasi hadir merupakan angka yang tidak sedikit di tengah kondisi dunia yang diliputi kesulitan.

"Saya kira dalam posisi normal itu biasanya yang hadir juga 17-18, ini posisi yang tidak normal, dunia sangat sulit, semua negara sangat sulit. Kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira sudah sangat bagus," ujar Jokowi.

Di samping itu, Jokowi memastikan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah KTT G20. Apalagi, setelah ia meninjau sejumlah tempat yang dijadikan lokasi penyelenggaraan KTT G20 pada Selasa ini.

"Jadi ini sudah H-7, saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang paling kecil sudah kita cek semuanya dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20," katanya. ● han

Imigrasi Langsung Deportasi WNA yang Unjuk Rasa Protes KTT G20

JAKARTA (IM) - Imigrasi akan mendeportasi warga negara asing (WNA) yang unjuk rasa memprotes jalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekajahjana mengatakan, pihaknya akan menindak tegas setiap orang asing yang dinilai mengganggu pelaksanaan forum pertemuan antarnegara itu.

"Terkait WNA yang melakukan aksi unjuk rasa, kami akan langsung mendeportasi demi keamanan dan ketertiban sepanjang kegiatan G20 ini," kata Widodo di Bandara Ngurah Rai Bali, Senin (7/11) malam, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.

Widodo mengatakan, tindakan ini dilakukan agar pertemuan forum G20 bisa berjalan dengan lancar. Namun, pihaknya menyatakan, tindakan tegas akan tetap dilakukan secara humanis. Ia mencontohkan, Senin (7/11), Kantor Imigrasi Kelas I Jember, Jawa Timur mengamankan warga negara Jepang dengan usia 57 tahun berjenis TS.

Menurut Widodo, warga negara Jepang tersebut melakukan aksi protes dengan cara membentangkan spanduk di Jalan Yos Sudarso, Kota Banyu-

wangi. Ia menilai, tindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi setempat merupakan langkah preventif dan persuasif.

"Saya telah menghubungi Konjen Jepang di Surabaya sehubungan dengan adanya warga Jepang yang berdemons-trasi di sini," ujar Widodo.

Ia mengungkapkan, warga negara Jepang itu telah mengaki kesalahannya dan telah menerima informasi sanksi yang bakal dijatuhkan, yakni deportasi. Widodo menyatakan, pihak Imigrasi memiliki sikap jelas akan tetap menjalankan fungsi pengamanan sekaligus memberikan pelayanan. "Jika ada pelanggaran oleh orang asing maka kami tetap tegas sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 yang akan berlangsung pada 15-16 November di Bali. Presiden Joko Widodo menyebut, 17 kepala negara telah mengonfirmasikan akan menghadiri pertemuan itu, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping.

"Sampai hari ini 17 kepala negara, kepala pemerintahan yang hadir," kata Jokowi di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Denpasar, Selasa (8/11/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden. ● han

2 Polhukam

FOTO: IDN/ANTARA



Prabowo Ingin Setiap Pesawat Tempur Dikawal 15 Drone yang Dilengkapi Rudal

Prabowo berharap, nantinya satu orang pilot pesawat tempur dikawal atau dikelilingi 15 drone yang dilengkapi rudal anti-pesawat.

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, pertahanan udara Indonesia harus dibangun dengan kekuatan pesawat nirawak atau drone yang dilengkapi rudal anti-pesawat.

"Kita harus mengerahkan sekarang taktik teknologi dan kemampuan drone dalam jumlah besar, drone Kamikaze dan sistem autonomus, sistem-sistem robotik di udara, di laut, dan di darat," kata Prabowo dalam "Seminar Nasional Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan" di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (8/11).

Prabowo berharap, nantinya satu orang pilot pesawat tempur dapat dikawal atau

dikelilingi oleh 15 drone yang dilengkapi rudal anti-pesawat. "Nanti ibaratnya ada satu pesawat tempur, katakanlah F-15 kita, katakanlah Rafale kita, tapi di sekelilingnya Rafale kita atau di sekeliling F15 kita mungkin ada 15 drone. Jadi, satu pilot dikawal oleh 15 drone yang semua drone punya rudal anti-pesawat," katanya.

Hal tersebut, kata Prabowo, dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara dengan sangat cepat.

"Jadi, satu skadron akan menjadi 10 skadron atau 15 skadron dengan harga yang tidak sebesar 15 skadron. Jadi, ini nanti juga akan meningkatkan kemampuan kita dengan cepat," ujarnya.

Tidak hanya pesawat ni-

rawak, kekuatan pertahanan udara Indonesia juga harus didukung oleh satelit dengan jumlah banyak, untuk mengantisipasi adanya serangan udara.

"Jadi kalau satu (satelit) ditembak, ada pengganti, dua ditembak, ada pengganti lagi, dan lain sebagainya," ucapnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi beruntung karena tidak terlibat ancaman perang dengan negara lainnya.

Namun, kondisi tersebut, kata Prabowo, jangan sampai membuat elite meremehkan aspek pertahanan Indonesia. Apalagi, saat ini harga gandum, pupuk, maupun BBM belum sepenuhnya stabil akibat perang Rusia dan Ukraina.

"Sekarang kita hadapi bahaya kenaikan harga pangan, langkanya pangan, belum lagi perang Rusia dan Ukraina. Ramalan tahun ke depan adalah tahun yang berat, karena akibat perang harga pangan meningkat. Karena Ukraina lumbung gandum dunia," ujar Prabowo.

RAKER PERSIAPAN PEMILU 2024

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11). Rapat kerja tersebut membahas persiapan Pilkada dan Pemilu 2024.

Kuasa Hukum Sambo dan Putri Protes Siaran Live Persidangan, Ini Kata Hakim

JAKARTA (IM) - Kuasa hukum terdakwa Ferdys Sambo dan Putri Candrawathi, Arman Hanis, protes majelis hakim terkait sidang yang disiarkan langsung (live). Pasalnya, saat tim pengacara berbicara atau bertanya pada saksi, malah tak diperdengarkan.

"Keberatan sidang para terdakwa disiarkan live, baik media TV nasional maupun di lingkungan pengadilan. Kita sudah mengatakan, membuat untuk di persidangan ini tidak live. Kita sudah sampaikan pada rekan-rekan media, bahkan kita sudah mengatur, tapi nyatanya masih ada. Itu di luar kewenangan kami," ujar Ketua majelis hakim, Wahyu Iman Santoso di persidangan, Selasa (8/11).

Wahyu mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal agar persidangan tidak disiarkan secara live. Pengadilan juga setiap hari melakukan evaluasi pada persidangan tersebut agar persidangan berjalan tanpa adanya gangguan.

"Semua keterangan Susi dalam persidangan Richard Eliezer disiarkan di media nasional dan lingkungan pengadilan. Sedangkan untuk keterangan ADC dan ART yang lainnya suaranya dibisukan," tutur hakim menyebutkan keberatan pen-

gacara.

Hakim menerangkan, sejatinya sidang tersebut disiarkan di lingkungan pengadilan untuk memenuhi kebutuhan pengujung sidang yang hendak mendengarkan persidangan. Maka itu, siaran pun dilakukan di area terbatas pengadilan.

"Kita sudah ada kesepakatan dengan rekan-rekan di TV, tidak menyiarkan live dalam arti termasuk suaranya. Itu sudah kita lakukan berulang kali, tapi masih ada kebocoran-kebocoran, baik disiarkan melalui YouTube atau yang lain. Kami tidak tahu-menahu," tutur hakim.

Wahyu mengungkapkan, guna menekan sidang tak disiarkan secara langsung, petugas PN Jakarta Selatan juga telah berupaya maksimal.

Sedangkan soal pengadilan yang ingin mendapatkan rekaman saat sidang, pengadilan tak pernah menolak dan bakal memberikan rekaman tersebut.

"Saudara menginginkan adanya rekaman sendiri, kita berikan, kita tidak pernah menolak. Silakan berhubungan dengan petugas keamanan kami dan kita tidak pernah menolak saudara untuk merekam," ujarnya.

Hakim melanjutkan,

pihaknya mempersilakan pengacara dan jaksa menggali kebenaran pada para saksi dalam persidangan. Namun, pengacara dan jaksa diminta untuk tidak mengulangi pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya pada para saksi.

Sementara itu, pengacara terdakwa Sambo dan Putri, Arman Hanis menambahkan, sebetulnya pihaknya tak keberatan siaran langsung dalam sidang kliennya itu disiarkan secara langsung atau live, baik di media TV maupun di area pengadilan.

Namun, pihaknya menginginkan keberimbangan. Sejauh ini saat pihaknya berbicara atau bertanya di persidangan kerap tak disiarkan ataupun suaranya tak terdengar.

"Kami sampaikan sidang pengadilan para terdakwa, disiarkan secara langsung atau live, baik di media televisi nasional maupun di lingkungan PN Jaksel kami tidak keberatan. Namun, apabila JPU yang bertanya suaranya diperdengarkan, saat tim penasehat hukum menanyakan pada saksi, itu suaranya dikedecikan. Jadi, kami mohon untuk bisa keadilan yang berimbang dan diberikan kesempatan yang sama dan seluas luasnya oleh majelis hakim," katanya. ● han

KPK Hibahkan Barang Rampasan Senilai Rp30 Miliar kepada TNI AU

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset senilai Rp30.940.375.000 kepada TNI Angkatan Udara (TNI AU). Aset tersebut merupakan barang rampasan dari tindak pidana korupsi itu diserahkan KPK melalui Kementerian Pertahanan kepada TNI AU, di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa (8/11).

Ketua KPK, Firlil Bahuri menjelaskan pemberian aset berupa tanah itu dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP)/hibah.

Ia mengatakan upaya tersebut merupakan pemanfaatan aset barang rampasan dari tindak pidana korupsi, yang tepat guna kepada lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

"Serah terima ini adalah bagian dari semangat membangun Indonesia dan semangat membantu tugas-tugas TNI AU," kata Firlil melalui keterangan resminya, Selasa (8/11).

Firlil mengungkapkan, Aset yang diterima TNI AU kali ini merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan atas nama terpidana Anas Urbaningrum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, ia melanjutkan, aset recovery itu juga berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas nama Emirshah Satar yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Jenis barang berupa sebidang tanah seluas 639 m²; bangunan rumah seluas 236,28 m², 134 m², dan 331,38 m²; bangunan musala 8,64 m²; dan bangunan pendopo 68m². Aset ini berada di Jalan Teluk Semangka Blok C9 Kav. No. 1 Kelurahan Duran Sawit, Jakarta Timur," terangnya Firlil.

"Kemudian sebidang tanah seluas 374 m²; bangunan rumah seluas 532,5

m²; dan bangunan pos satpam seluas 4,76 m² di Jalan Pinang Merah II Blok SK Persil No. 7-8, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," lanjut Firlil.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo memuji langkah KPK yang menghibahkan aset negara kepada TNI AU.

"Forum ini bukti kerja sama Kementerian Pertahanan cq TNI AU, KPK, dan Kementerian Keuangan sesuai bidang perannya masing-masing. Sehingga hari ini, TNI AU mendapatkan bantuan aset barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan yang berada di dua lokasi Jaksel dan Jaktim," ujar Fadjar.

Sebagai informasi, KPK juga membuka kesempatan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bisa memanfaatkan barang rampasan dari pelaku tindak pidana korupsi yang didapatkan oleh KPK. Pemanfaatan barang rampasan tersebut melalui cara sewa, pinjam pakai, ataupun kerja sama pemanfaatan.

"Untuk mengoptimalkan barang rampasan KPK, selain melalui lelang dan PSP/hibah, dalam waktu dekat KPK melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) akan mulai melaksanakan Pemanfaatan Barang Rampasan (paras) dengan menyewakan aset rampasan yang nantinya bisa diakses melalui situs: paras.kpk.go.id secara terbuka dan transparan," kata Firlil.

Untuk diketahui, Kegiatan ini sejalan dengan ketentuan PMK No. 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang telah diubah menjadi PMK No. 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. ● han



FOTO: ANT

KPK PERIKSA SOEKARWO SEBAGAI SAKSI KASUS SUAP

Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/11). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 yang menjerat Kepala Bappeda Jawa Timur periode 2017-2018 Budi Setiawan.

Jaksa Incar Dana Rp106 Triliun dari Kasus Penipuan KSP Indosurya

JAKARTA (IM) - Sidang ke-13 perkara penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (8/11).

Ketua Jaksa Penuntut Umum Syahnun Tanjung mengemukakan, timnya memanggil 11 saksi untuk memberi pernyataan dalam persidangan hari ini. Keseluruhan saksi itu terdiri dari beberapa pengurus koperasi yang telah bersumpah pada persidangan sebelumnya, Jumat (4/11), hingga karyawan dengan peran berbeda.

Selain pegawai Indosurya, tiga orang pegawai bank yang melayani kegiatan perbankan KSP Indosurya juga turut dihadirkan.

"Hari ini kami mengundang 11 orang saksi. Terdiri dari tiga pihak bank dan sisanya pengurus koperasi, ada yang menyalurkan uang, hingga penerima uang," kata Syahnun saat ditemui di persidangan, Selasa (8/11).

Syahnun mengatakan, tim JPU pada hari ini hendak mencari tahu terkait ke mana saja aliran dana korban yang

berjumlah Rp 106 triliun.

"Yang diincar itu ke mana uang Rp 106 triliun itu. Kami mengejar uangnya ke mana? Karena ada 20-an cabang perusahaan (penerima aliran dana). Kami mengejar Tindak Pidana Pencucian Uang, ancamannya kan 20 tahun, kalau bank cuma 15 tahun," jelas Syahnun.

Adapun, kasus penipuan investasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya saat ini disebut menjadi yang terbesar di Indonesia, dengan nilai kerugian mencapai Rp 106 triliun, dengan korban mencapai 23.000 orang.

Selain itu, kejaksanan juga mengendus adanya lebih banyak aset Indosurya yang belum masuk daftar penyiataan. Besarnya mencapai Rp 44 triliun, dan tengah didorong untuk segera dikabulkan proses penyiataannya.

"Nilai total aset 106 triliun itu banyak. Kami ajukan lagi karena kami dapat data dan bukti dari penyidikan. Akan menyusul aset senilai Rp 44 triliun. Sudah kami ajukan penyiataan, tapi belum dikabulkan," kata Syahnun beberapa waktu lalu. ● mei

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan pemberitaan PT Suryamas Khatulistiwa (dalam likuidasi) [Perseroan] berdasarkan akta tanggal 29 April 2021 No. 91, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tangerang, 9 November 2022
Likuidator
PT Suryamas Khatulistiwa (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan pemberitaan PT PRAJA ADIKARA UTAMA (dalam likuidasi) [Perseroan] berdasarkan akta tanggal 29 April 2021 No. 93, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tangerang, 9 November 2022
Likuidator
PT PRAJA ADIKARA UTAMA (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan pemberitaan PT FERRY THAHIR AGENSI (dalam likuidasi) [Perseroan] berdasarkan akta tanggal 2 November 2020 No. 2, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 9 November 2022
Likuidator
PT FERRY THAHIR AGENSI (dalam Likuidasi)